



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/290/427.12/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rumpun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah;
13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Pelayanan Publik;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik ;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/02/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 27 Tahun 2017;
23. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Review RPJMD.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum Kesatu terdiri dari:
- a. indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang;
 - b. indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum Kedua, bertujuan untuk:
- a. memberikan informasi kinerja yang penting dan mendapat prioritas serta diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - b. mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum Kedua huruf a, dimanfaatkan untuk:
- a. perencanaan jangka menengah Kabupaten Lumajang;
 - b. perencanaan Tahunan Kabupaten Lumajang;
 - c. penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten Lumajang;
 - d. pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lumajang;
 - e. evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lumajang;
 - f. pemantauan dan pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/206/427.12/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 28 Juli 2017



SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lumajang;
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kab. Lumajang;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/290/427.12/2017
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

- Tanggungjawab : Bupati Lumajang
- Visi : Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat
- Misi : 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan ;
2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya ;
3. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.
- Tujuan : 1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, pembinaan keagamaan serta pengembangan dan pelestarian budaya
2. Meningkatkan aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas SDM perempuan, pemuda dan anak
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat
5. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lainnya
6. Meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan transparan

7. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Tertib dan Aman

- Indikator Tujuan :
1. Indeks Pendidikan
 2. Indeks Kesehatan
 3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 4. Persentase Pertumbuhan Ekonomi
 5. Tingkat Kemiskinan
 6. Indeks GINI
 7. Indek Reformasi Birokrasi
 8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 9. Indeks Rasa Aman

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula		Sumber Data	SKPD PJ
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	X 100%	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya			
		2. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA	X 100%		
			Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya			
		3. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	X 100%		
			Jumlah siswa yang mengikuti ujian tingkat SD/MI			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula		Sumber Data	SKPD PJ
		4. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Jumlah siswa yang lulus tingkat SMP/MTs	X 100%		
			Jumlah siswa yang mengikuti ujian tingkat SMP/MTs			
2.	Meningkatnya minat baca masyarakat	5. Indeks Pembangunan Literasi	Nilai indeks minat baca tahun (N-(N-1))	X 100%	Dinas Kearsipan & Perpustakaan	Dinas Kearsipan & Perpustakaan
			Nilai indeks minat baca tahun N-1			
3.	Terpeliharanya Budaya Daerah	6. Persentase Budaya Daerah yang dilestarikan	Jumlah budaya daerah yang dilestarikan	X 100%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Jumlah budaya daerah yang dimiliki			
4.	Meningkatnya kualitas pembinaan keagamaan	7. Persentase fasilitasi pembinaan keagamaan	Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan	X 100%	Bag. Adm. Kesra	Sekretariat Daerah
			Jumlah kegiatan keagamaan sesuai SKB 3 Menteri			
		8. Nilai pendidikan keagamaan	Jumlah nilai pendidikan keagamaan		Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Jumlah seluruh siswa SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B			
5.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	9. Angka Harapan Hidup	Data hasil perhitungan oleh BPS		BPS	Dinas Kesehatan
6.	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	10. Total Fertility Rate (TFR)	Data hasil perhitungan oleh BPS		BPS	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PP
7.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	11. Persentase Indeks Pembangunan Gender:	Data hasil perhitungan oleh BPS		BPS	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula		Sumber Data	SKPD PJ
8	Meningkatnya Prestasi Olahraga Daerah	12. Jumlah Cabang Olahraga (Cabor) Berprestasi	Jumlah cabang olahraga berprestasi tahun N		Dinas Pemuda & Olahraga	Dinas Pemuda & Olahraga
9	Meningkatnya Usaha Perdagangan	13. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB sektor Perdagangan (tahun N – tahun dasar 2013)	X 100%	Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan
			Nilai PDRB sektor perdagangan tahun dasar 2013			
10	Meningkatnya Sektor Industri	14. Persentase PDRB Sektor Perindustrian	Nilai PDRB sektor Industri (tahun N – tahun dasar 2013)	X 100%	Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan
			Nilai PDRB sektor Industri tahun dasar 2013			
11	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	15. Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	Jumlah koperasi sehat dan cukup sehat	X 100%	Dinas Koperasi & UMKM	Dinas Koperasi & UMKM
			Jumlah koperasi yang dinilai			
		16. Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	Jumlah usaha Mikro tahun N – Jumlah usaha mikro tahun dasar	X 100%	Dinas Koperasi & UMKM	Dinas Koperasi & UMKM
			Jumlah usaha mikro tahun dasar			
12	Meningkatnya Investasi di Daerah	17. Persentase Kenaikan Nilai PMDN	Nilai PMDN tahun N – Nilai PMDN tahun N-1	X 100%	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Dinas Penanaman Modal & PTSP
			Nilai PMDN tahun N-1			
13	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Transportasi	18. Indeks angka kecelakaan lalu lintas	Jumlah kecelakaan lalu lintas x 100.000	X 100	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
			Jumlah penduduk			
14	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	19. Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	Jumlah penganggur terbuka	X 100%	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Jumlah angkatan kerja			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula		Sumber Data	SKPD PJ
15	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Dalam PDRB	20. PDRB Sektor Pertanian	$\text{Nilai PDRB Sektor Pertanian tahun N-1} + (\text{Nilai PDRB Sektor Pertanian tahun N-1} \times 0,03)$		Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
16	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan Dalam PDRB	21. PDRB Sektor Perikanan	$\text{Nilai PDRB sektor perikanan tahun N-1} + (\text{nilai PDRB sektor perikanan tahun N-1} \times 2\%)$		Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
17	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	22. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$30\% \text{ IKU (Indeks Kualitas Udara)} + 30\% \text{ IKA (Indeks Kualitas Air)} + 40\% \text{ ITV (Indeks Tutupan Vegetasi)}$		Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
18	Meningkatnya Wisatawan	23. Persentase peningkatan jumlah Kunjungan Wisatawan	$\frac{\text{Jumlah total kunjungan wisatawan (tahun N)} - \text{jumlah total kunjungan wisatawan (tahun N-1)}}{\text{jumlah total kunjungan wisatawan (tahun N-1)}}$	X 100%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			$\frac{\text{jumlah total kunjungan wisatawan (tahun N)}}{\text{jumlah total kunjungan wisatawan (tahun N-1)}}$			
19	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	24. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	$I A = \frac{\sum P_n}{\sum P_0}$	X 100	Dinas PU dan Tata Ruang	Dinas PU dan Tata Ruang
			$\frac{\sum P_n}{\sum P_0}$			
20	Meningkatnya Penataan Kawasan Daerah Sesuai Tata Ruang	25. Jumlah Dokumen Tata Ruang yang Diperdakan	$\text{Jumlah dokumen tata ruang yang di-Perdakan tahun N}$		Dinas PU dan Tata Ruang	Dinas PU dan Tata Ruang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula		Sumber Data	SKPD PJ
21	Meningkatnya Ketahanan Pangan	26. Persentase peningkatan pola pangan harapan (PPH)	Realisasi skor PPH tahun N	X 100%	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Target skor PPH tahun N			
22	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Desa	27. Penurunan Jumlah Desa Tertinggal (DT) dan Desa Sangat Tertinggal (DST) Berdasarkan Indeks Desa Membangun	Jumlah desa tertinggal (DT) dan Desa Sangat Tertinggal (DST) tahun N-1 dikurangi Jumlah desa tertinggal (DT) dan Desa Sangat Tertinggal (DST) tahun N		DPMD	DPMD
23	Meningkatnya Kualitas Sarana Dasar Permukiman	28. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Terlayani Infrastruktur Dasar	Jumlah Rumah Tangga (RT) yang Terlayani Infrastruktur Dasar	X 100%	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
			Jumlah seluruh Rumah Tangga			
24	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	29. Persentase PMKS Skala Kabupaten yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Jumlah PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar	X 100%	Dinas Sosial	Dinas Sosial
			Jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar			
25	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	30. Persentase Penduduk yang terlayani Adminduk	Jumlah penduduk yang terlayani Adminduk	X 100%	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
			Jumlah penduduk yang seharusnya terlayani Adminduk			
26	Meningkatnya Keterbukaan Komunikasi dan Informasi	31. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Publik	Jumlah saluran penyebarluasan informasi dan komunikasi pada tahun N		Dinas Komunikasi & Informatika	Dinas Komunikasi & Informatika

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula		Sumber Data	SKPD PJ
27	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	32. Persentase OPD dengan predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)	Jumlah OPD dengan predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)	X 100%	Inspektorat	Inspektorat
			Jumlah seluruh OPD			
		33. Nilai Maturitas SPIP	Penerapan Level SPIP OPD level 3		Inspektorat	Inspektorat
		34. Nilai LPPD	Nilai LPPD dengan Kategori Sangat Tinggi		Bag. Adm. Pemerintahan	Sekretariat Daerah
		35. Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai SAKIP minimal B		Bag. Organisasi	Sekretariat Daerah
		36. Persentase Kompetensi ASN	Jumlah pejabat struktural yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	X 100%	BKD	BKD
			Jumlah seluruh pejabat struktural			
		37. Persentase Prolegda yang ditetapkan menjadi Perda	Jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi Perda	X 100%	Bag. Hukum	Sekretariat Daerah
			Jumlah Raperda yang diajukan untuk ditetapkan sebagai Perda			
38. Hasil Audit Kearsipan Pemerintah Kabupaten	Nilai audit tahun (N-(N-1))	X 100%	Dinas Kearsipan & Perpustakaan	Dinas Kearsipan & Perpustakaan		
	Nilai audit tahun N-1					
39. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM		Bag. Organisasi	Sekretariat Daerah		
28	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	40. Opini BPK	Data hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK RI		BPK-RI	BPKD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula		Sumber Data	SKPD PJ
29	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat	41. Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)	Jumlah gangguan Trantibum tahun N -	X 100%	1. Bakesbang pol 2. Satpol PP	3. Bakesbang pol 4. Satpol PP
			Jumlah gangguan Trantibum tahun N-1			
30	Meningkatnya Penanganan Penanggulangan Bencana	42. Indeks Risiko Bencana	Bencana x	X 100%	BPBD	BPBD
			Kerentanan Kapasitas			

